



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
2024-2026**



**JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD No. 28 BLOK C  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka menyesuaikan arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja. Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu tiga tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini.

Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai. Agar dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng,     Maret 2023  
**Kepala Dinas Sosial,**

**SOALIHIN, S. Pd, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660717 199103 1 018



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR..</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>24</b>
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial .....	24
3.2 Isu-Isu Strategis.....	24
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>26</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial .....	26
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>39</b>
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	41
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	41
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal .....	42
7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang Relevan dengan Perangkat Daerah.....	43
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>45</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	11
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur .....	12
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	12
Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional .....	13
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	14
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial.....	16
Tabel 2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.3.3 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020-2022.....	18
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial ....	27
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	30
Tabel T-C.27 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 .....	32
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 .....	35
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	39
Tabel 7.1 Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah .....	40
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	41
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	41
Tabel 7.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2020-2023 .....	42
Tabel 7.5 Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022-2026.....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang sudah ditetapkan oleh peraturan Daerah, yang mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dimana perumusannya juga berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Sosial agar lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan baik tujuan, sasaran, program maupun anggaran dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selaku bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang berisikan dokumen perencanaan SKPD untuk kurun 3 (tiga) tahun yang memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kesejahteraan sosial.



Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;





31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
35. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
36. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial.
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024-2026:

1. Memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menentukan indikator, target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.
2. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan Dinas Sosial dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.
3. Sebagai bahan evaluasi tahunan dan lima tahunan pelaksanaan kegiatan, program dan pencapaian sasaran Dinas Sosial dan Bahan Rujukan penyusunan Renja.
4. Sebagai dasar penyusunan Renja dan RKA.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

- BAB I                   PENDAHULUAN**  
Menjelaskan latar belakang memuat pengertian, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II                   GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**  
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang, yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB III                  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**  
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV                  TUJUAN DAN SASARAN**  
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB V                   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial.
- BAB VI                  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**  
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.
- BAB VII                 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.
- BAB VIII               PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi Kewenangan Daerah.

##### **2.1.2 Fungsi**

Adapun fungsi yang merupakan wujud pekerjaan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

##### **2.1.3 Uraian Tugas**

###### **a. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

###### **b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas di bidang



sosial yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

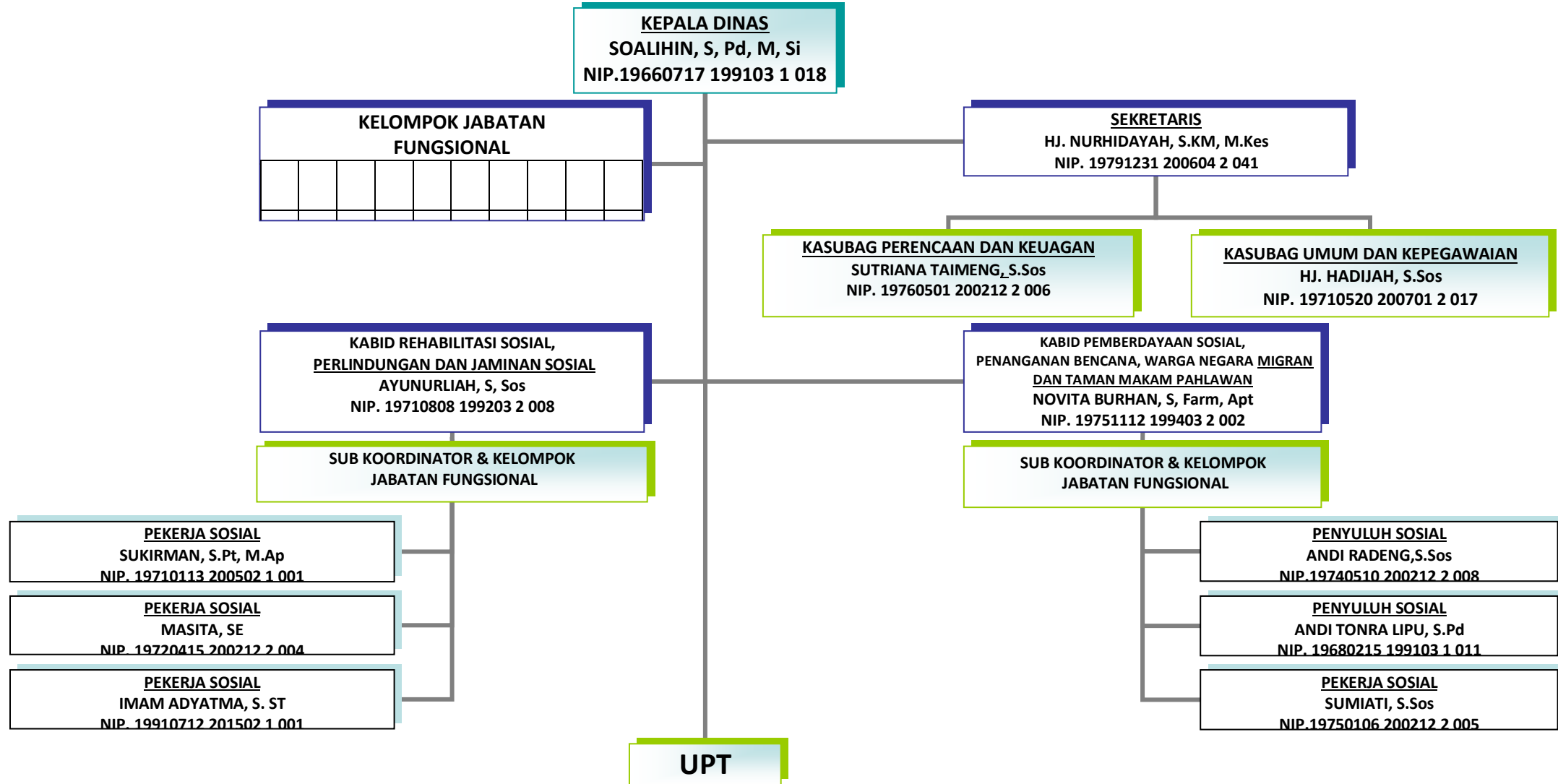
- **Sub bagian perencanaan dan keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Sub bagian umum dan kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Golongan IV	1	1	2	1	5	22,72
Golongan III	-	4	6	3	13	59,10
Golongan II	-	4	-	-	4	18,18
Golongan I	-	-	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel di atas golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 59,10 persen dari total pegawai sebesar 13 orang. Urutan kedua terbesar adalah golongan IV sebesar 22,72 persen sebanyak 5 orang. Selanjutnya sebesar 18,18 persen berada pada golongan II sebanyak 4 orang. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.



Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
S-3	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	1	1	-	3	18,18
S-1	-	3	7	4	14	59,09
Diploma I-III	-	1	-	-	1	4,54
SMA Sederajat	-	4	-	-	4	18,18
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 ke atas. Dengan proporsi S1 sebanyak 59,09 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 18,18 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.



Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
25 – 30	-	-	1	-	-	4,54
31 – 40	-	6	5	-	11	50,00
41 – 50	-	3	3	4	10	45,45
51 – 58	1	-	-	-	1	4,54
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan kelompok umur, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada usia 31-40 sebanyak 11 orang atau 50,00 persen, sedangkan kelompok umur 41-50 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 10 orang atau 45,45 persen. Selanjutnya usia 51-58 sebanyak 1 orang atau 4,54 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25-30 sebanyak 4,54 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Perempuan	-	4	5	3	11	50,00
Laki-Laki	1	5	3	1	11	50,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>





Berdasarkan Jenis Kelamin jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang dengan persentase 50,00 persen dan sebanyak 12 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 50,00 persen.

### 2.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Menurut Jumlah kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Roda 4	1	1	2	4
Roda 2	2		5	7
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

Kendaraan dinas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 11 unit, dengan rincian sebanyak 4 unit kendaraan roda 4 dengan kondisi yang rusak berat 2 unit, rusak ringan 1 unit dan 1 unit baik. Sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit dengan kondisi rusak berat 5 unit dan 2 unit lainnya baik.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2018-2023.

#### 2.3.1 Kinerja Renstra Dinas Sosial Periode **2014-2018**

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dalam periode 2018-2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
1	Jumlah PMKS		12.093		12.093	12.083	12.080	12.080	10.300	12.080	12.080	12.063	10.043	10.300	99.97	99.85	99.69	99.45	
2	Tertanganinya korban bencana																		
3	Meningkatnya pengawasan dan pendistribusian beras bagi warga miskin																		
4	Penanganan korban bencana dengan baik																		
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma																		
6	Penanganan PMKS bermasalah sosial																		
7	Tersedianya tenaga pendamping sosial																		
8	Tercapainya perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM)																		
9	Peningkatan peran aktif kelembagaan dan keajahteraan sosial																		
10	Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial																		
11	Terwujudnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS																		
12	Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan AT																		
13	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial																		
14	Persentase PMKS yang tertangani																		
15	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar																		
16	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya																		
17	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial																		
18	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial																		
19	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat																		
20	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap																		
21	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial																		



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

22	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						100	100	0			100	100	0					
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota						100	100	100			100		100					
24	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						100	100	100			73	73	70					
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						100	100	100			64	64	100					
26	Pemberian Layanan Kedaruratan						0	0	100			0	0	1					
27	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						100	100	0			100	100	0					
28	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100	100	100			100	100	100					
29	Penyediaan Permakanan						0	0	100			0	0	87					
30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						100	100	100			100	100	100					
31	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot						100	100	100			33	33	100					

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,471,190,000	978,883,500	451,965,500			915,280,511	909,731,530	352,297,835			-43.65	-30.94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274,150,000	147,378,000	281,946,000			37,183,567	62,360,527	195,511,570			22.53	140.61
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95,660,000	109,038,500	58,021,000			72,225,250	106,345,800	57,336,000			-16.40	0.58
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,811,648,000	411,200,000	199,127,500			1,861,530,501	411,176,000	70,933,266			-68.47	-80.33
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	122,366,000					120,256,000						#DIV/0!
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	1,250,845,000	650,000,000	400,176,000			728,685,500	6,162,033,000	391,956,500			-43.23	326.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	905,694,000	643,435,000	759,731,000			693,383,350	627,307,150	752,449,208			-5.44	5.21
Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	290,458,000	172,000,000	104,998,000			209,279,500	170,457,500	100,866,500			-39.87	-29.69
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	126,421,500	72,450,000	87,460,000			92,271,500	61,984,500	86,569,000			-10.99	3.42
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				2,639,791,180	2,657,270,300				2,540,270,685	2,540,920,973	0.66	0.03
Program Pemberdayaan Sosial				825,760,000	789,105,400				789,105,400	96,192,700	-4.44	-87.81
Program Rehabilitasi Sosial				738,234,000	720,597,799				720,597,799	35,863,500	-2.39	-95.02
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				504,808,000	412,487,700				497,417,470	370,583,700	-18.29	-25.50
Program Penanganan Bencana				200,511,000	174,725,200				198,490,400	138,704,700	-12.86	-30.12
Program Penanganan Taman Makam Pahlawan				37,449,000	34,998,100				35,847,400	34,906,150	-6.54	-2.63



### 2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Standar Pelayanan tahun 2022 Dinas Sosial yang menjadi pengampu Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

### 2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2018-2022 yang relevan dengan Perangkat Daerah. Format Tabel TPB/SDGs dapat dilihat pada table berikut:



**Tabel 2.3.3**  
**Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2018-2022**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN</b>							
<b>Tujuan SDGs 01 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN</b>							
<b>Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5.16	4.78	5.05	5.04	5.04
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	260	305	369	17	2075
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	7416	7424	8448	11215	10575
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	100	100	100	100	100
1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-	-	-	-	-
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-	-	-	-	-



1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	11,935	107,329	16,336		
<b>TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan</b>							
<b>Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara</b>							
<b>10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>							
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.34	0.284	0,349	0,358	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	5.16	4.78	5.05	5.04	5.04
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	0.2695	0.2695	0.2695		
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-

**INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017**

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Analisis)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat														
24	Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keluarga tidak ada
Aspek Pelayanan Umum														
6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	43.13	12.06	14.88	10.35	97.2	93.7	14.71	30%	30%	30%	30%	Masih terdapat PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial
6.2	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	99.96	99.09	99.46	63.05	97.2	93.7	65.93	30%	30%	30%	30%	Masih adanya PMKS yang belum tertangani
6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	99.96	99.09	99.46	63.05	97.2	52.7	21.50%	20%	20%	20%	20%	Masih adanya PMKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya
6.4	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	100	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	Program KUBE sudah tidak dijalankan di Dinas Sosial Kabupaten
6.5	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan tidak ada di Dinas Sosial
6.6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	100	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	Kegiatan WKBSM belum pernah dilaksanakan
6.7	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.8	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	Pendataan tidak akurat



**INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020**

No.	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
<b>Outcome</b>	<b>Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)</b>	%	0.57	-	0.68	1.7	0.46	2.07 %	917 %	3.04	4.6	4.14	3.68	
1.1	Jumlah Layanan Data Dan Pengaduan Yang Dimiliki	Buah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM Dan OTM	Orang	-	-	-	-	-	2	237	10	150	200	225	
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Data Tidak Tersedia
1.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dijangkau	Orang	17	-	20	50	10	73	244	90	50	70	100	
1.5	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan Yang Dimiliki	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	Orang	17	-	20	30	10	45	199	66	100	90	80	
1.7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara Yang Dimiliki Sesuai Standar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara Yang Dimilik
1.8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	Orang	-	-	-	20	-	4	109	3	100	90	80	
1.9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	
1.10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia Di Rumah Singgah/Shelter	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Alat Bantu Yang Tersedia Di Rumah Singgah/Shelter
1.11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
1.13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan Di Rumah Singgah	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional Dan/Atau TKS Dan/Atau Relawan Sosial Yang Disediakan	Orang	150	157	189	191	189	189	187					
1.15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Dan Sosial Sesuai Standar Di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Sheelter Dan/Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	14	6	7	10	6	
1.16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga Dan Masyarakat	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	2	13	7	10	6	
1.17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	-	-	-	-	-	7	5	12	5	5	5	
1.18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	-	-	-	-	-	1	6	10	3	4	3	
1.19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	19	2	90	7	4	3	
1.20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	1	4	4	7	4	3	
1.21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dirujuk	Orang	-	-	-	-	-	1	5	3	3	1	1	
<b>Outcome</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>	%						100	100	100	100	100	100	
2.1	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Makanan	Orang						302	1417					
2.2	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang	Orang						210	1490	1321	1400	1400	1400	
2.3	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki	Unit								10	15	15	15	
2.4	Jumlah Paket Permakanan Khusus Bagi Kelompok Tertentu	Paket								364	400	400	400	
2.5	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang								254	300	300	300	
2.6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawean Sosial Yang Tersedia	Orang						37	37	37	37	38	38	



## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tentu melakukan kerja sama baik antara Dinas dalam lingkup Pemerintahan Daerah, Desa/Kelurahan maupun instansi lainnya. Berikut beberapa instansi yang menjadi mitra layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Desa/Kelurahan terkait layanan terpadu yang memudahkan pengidentifikasian kebutuhan masyarakat serta bagaimana menghubungkan masyarakat dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BPJS Kesehatan dalam hal ini untuk mempermudah pendaftaran, aktivasi dan validasi jaminan kesehatan masyarakat miskin. Hal ini juga termasuk pendistribusian peserta BPJS. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait menerbitkan dan mencari tahu identitas dalam hal ini NIK atau No. KK orang atau jiwa terlantar yang tidak diketahui identitasnya.

Kepolisian dan Satpol bersama-sama dengan Dinas Sosial dalam melakukan razia atau penanganan anak terlantar, gelandangan/pengemis serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya baik itu ditempat umum maupun ditempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dinas Ketenagakerjaan kerja sama dalam memulangkan atau mengembalikan warga migran terlantar ke tempat asalnya.

Selanjutnya Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan terlantar. Selanjutnya Bulog bersama Dinas Sosial dalam penyediaan dan penyaluran bantuan baik itu berupa beras maupun bahan pokok lainnya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial**

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut:

No.	Masalah	Solusi
1	Belum tersedianya Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dukungan Pemerintah Daerah
2	Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di lapangan	Dukungan Pemerintah Daerah
3	Masih kurang Akuratnya Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Melakukan verifikasi dan validasi data PPKS
4	Kurangnya SDM tenaga Profesional	Peningkatan Kualitas SDM
5	Kegiatan WKBSM belum pernah dilaksanakan	Tersedianya WKBSM

#### **3.2 Isu-Isu Strategis**

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam dalam rangka merealisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal. Yang kedua dukungan peralatan yang memadai.



Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial. Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan sosial selama lima tahun yang akan datang adalah:

1. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
				2021/2022	2023	2024	2025	2026		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang Tertangani	84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1	
		Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	14,176	13,126	12.994	12.864	12.736	12.736	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	CC	B	B	B	B	B	

**CASCADING DINAS SOSIAL**

No	Cascading Renstra Dinas Sosial				
	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program/Indikator	Kegiatan/Indikator	Sub Kegiatan/Indikator
1	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PMKS yang Tertangani	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b> Persentase PSKS Yang Tertangani	<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</b> Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</b> Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					<b>Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat</b> Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
					<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b> Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			<b>Program Penanganan Bencana</b> Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	<b>Penyediaan Makanan</b> Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
				<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	<b>Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b> Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
			<b>Program Penanganan Taman Makam Pahlawan</b> Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b> Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b> Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b> Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial sampai tahun sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan sosial. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 terangkum dalam table berikut:

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Peningkatan upaya penanganan PMKS	Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kapasitas/kelembagaan SDM pelaksana	Optimalisasi Penanganan PMKS
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan melekatkan dukungan, pembinaan dan pengawasan



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel T-C.27**  
**Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,540,270,685</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,063,695,451</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
			<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>85,453,800</b>	<b>100 Persen</b>	<b>77,942,200</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	100	6 Laporan	85,453,800	6 Laporan	77,942,200	Dinsos	Kab.Sidrap
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>		<b>1,935,134,195</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,922,627,683</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,894,505,195	12 Bulan	1,905,484,783	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	40,629,000	12 Bulan	19,14,900	Dinsos	Kab.Sidrap
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah			0	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>226,822,087</b>	<b>100 Persen</b>	<b>235,067,541</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	18,602,177	12 Bulan	23,374,841	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan		210 Kali	208,219,910	210 Kali	211,692,700	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>		<b>32,995,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>72,200,000</b>	Dinsos	Kab.Sidrap
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan			-	50	52,700,000	Dinsos	Kab.Sidrap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan			32,995,000	50	19,500,000	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>197,424,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>132,817,100</b>	Dinsos	Kab.Sidrap
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1500	2,000,000	1500	1,000,000	Dinsos	Kab.Sidrap
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1500	1500	195,424,000	1500	131,817,100	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>		<b>62,441,603</b>	<b>100 Persen</b>	<b>106,715,722</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		-	62,441,603	11	35,718,722	Dinsos	Kab.Sidrap
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara				13	1,050,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara				1	69,947,000		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>789,105,400</b>	<b>83 Persen</b>	<b>148,683,700</b>	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>Pengembang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS Yang Tertangani</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>789,105,400</b>	<b>83 Persen</b>	<b>148,683,700</b>	Dinsos	Kab.Sidrap
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	8,909	11.130 KK	53,541,600	0	0	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	8	6 Lembaga	735,563,800	6 Lembaga	148,683,700	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>720,597,799</b>	<b>100 Persen</b>	<b>38,193,500</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>79,319,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>38,193,500</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	0		38,313,000	15	14,051,800	<b>Dinsos</b>	<b>Kab.Sidrap</b>



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti			41,006,000	2170	23,095,700	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan			0	1	1,046,000		
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>641,278,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba	1	1	641,278,799	0	0	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin</b>	<b>85</b>		<b>497,417,470</b>	<b>100 Persen</b>	<b>371,253,700</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial</b>	<b>85</b>		<b>497,417,470</b>	<b>100 Persen</b>	<b>371,253,700</b>	Dinsos	Kab.Sidrap
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola	23,893	-	497,417,470	11,656	371,253,700	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>198,490,400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>123,891,300</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	<b>14,698,000</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan		<b>0</b>	<b>0</b>	80	14,698,000	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>198,490,400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>107,497,800</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	36	37	198,490,400	37	109,193,300	Dinsos	Kab.Sidrap
	<b>PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,847,400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>34,906,150</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,847,400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>34,906,150</b>	<b>Dinsos</b>	Kab.Sidrap
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi	0	-	35,847,400	3	34,906,150	Dinsos	Kab.Sidrap
					<b>4,781,729,154</b>		<b>3,264,552,596</b>		

**Tabel 6.1**  
**Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			<b>NON URUSAN</b>										
		01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,213,379,946	100 Persen	2,235,513,745	100 Persen	2,257,868,883	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	31,000,000	100 Persen	31,310,000	100 Persen	31,623,100	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	31,000,000	6 Dokumen	31,310,000	6 Dokumen	31,623,100	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,885,490,946	100 Persen	1,904,345,855	100 Persen	1,923,389,314	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,881,990,946	12 Bulan	1,900,810,855	12 Bulan	1,919,818,964	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3,500,000	12 Dokumen	3,535,000	12 Dokumen	3,570,350	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0	0	100 Persen	4,030,000	100 Persen	5,070,300	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	0	25 Dokumen	4,030,000	25 Dokumen	5,070,300	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	103,500,000	100 Persen	100,505,000	100 Persen	100,510,050	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	12 Paket	500,000	12 Paket	505,000	12 Paket	510,050	Dinsos	Kab. Sidrap





**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

				Disediakan									
		01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	210 Laporan	103,000,000	210 Laporan	100,000,000	210 Laporan	100,000,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		<b>01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>149,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150,490,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>151,994,900</b>	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan	500,000	1500 Laporan	505,000	1500 Laporan	510,050	<b>Dinsos</b>	<b>Kab. Sidrap</b>
		01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28,000,000	12 Laporan	28,280,000	12 Laporan	28,562,800	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120,500,000	12 Laporan	121,705,000	12 Laporan	122,922,050	Dinsos	Kab. Sidrap
		<b>01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>44,389,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>44,832,890</b>	<b>100 Persen</b>	<b>45,281,219</b>	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	44,389,000	13 Unit	44,832,890	13 Unit	45,281,219	Dinsos	Kab. Sidrap
		<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>										
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	1.06.0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 Persen	95 Persen	52,000,000	100 Persen	52,520,000	100 Persen	53,045,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	95 Persen	52,000,000	100 Persen	52,520,000	100 Persen	53,045,200	<b>Dinsos</b>	<b>Kab. Sidrap</b>
		1.06.0 2.2.03. 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	52,000,000	6 Lembaga	52,520,000	6 Lembaga	53,045,200	Dinsos	Kab. Sidrap



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

1.06.0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen	1,200,000,000	100 Persen	1,212,000,000	100 Persen	1,224,120,000	Dinsos	Kab. Sidrap	
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap	
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap	
		Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap	
	1.06.0 4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen	100 Persen	1,200,000,000	100 Persen	1,212,000,000	100 Persen	1,224,120,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	15 Orang	500,000,000	15 Orang	505,000,000	15 Orang	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	2170 Orang	700,000,000	2170 Orang	700,000,000	2170 Orang	700,000,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0	10 Orang	7,000,000	10 Orang	14,070,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	100 Persen	94 Persen	500,000,000	96 Persen	505,000,000	98 Persen	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.0 5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100 Persen	94 Persen	500,000,000	96 Persen	505,000,000	98 Persen	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap	



**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

	1.06.0 5.2.02. 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11655 Keluarga	12951 Keluarga	200,000,000	12951 Keluarga	202,000,000	12951 Keluarga	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 5.2.02. 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	55 Keluarga	300,000,000	55 Keluarga	303,000,000	55 Keluarga	306,030,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	<b>1.06.0 6</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>79 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>232,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>234,320,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>236,663,200</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab. Sidrap</b>
	1.06.0 6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	87 Persen	100 Persen	200,000,000	100 Persen	202,000,000	100 Persen	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 1.2.01. 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	300 Orang	200,000,000	300 Orang	202,000,000	300 Orang	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	77 Persen	100 Persen	32,000,000	100 Persen	32,320,000	100 Persen	32,643,200	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 6.2.02. 02	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	32,000,000	37 Orang	32,320,000	37 Orang	32,643,200	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 7	<b>PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>20,200,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>20,402,000</b>	<b>Dinsos</b>	<b>Kab. Sidrap</b>
	1.06.0 7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 Persen	20,000,000	100 Persen	20,200,000	100 Persen	20,402,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 7.2.01. 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	3 Makam	20,000,000	3 Makam	20,200,000	3 Makam	20,402,000	Dinsos	Kab. Sidrap
						<b>4,217,379,946</b>		<b>4,259,553,745</b>		<b>4,302,149,283</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dimaksud, dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	83	100	100	95	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	90	100	100	94	96	98	98
8	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100



**Tabel 7.1**  
**Keselarasan RPD dan Renstra Perangkat Daerah**

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
								2021/2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang Tertangani	84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1	
							Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	14,176	13,126	12,994	12,864	12,736	12,736	
			Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	CC	B	B	B	B	B		



### 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang berasal dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah				Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
				2021/2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Bidang Sosial								
	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PMKS yang Tertangani		84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1
1	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang diberi bantuan -----x 100% Jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada	14,176	13,126	12.994	12.864	12.736	12.736
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip		CC	B	B	B	B	B

### 7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No	Bidan Urusan / Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
			2022	2024	2025	2026	
	Urusan Bidang Sosial						
1	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan ----- X 100% Total Lembaga yang Ada	83	95	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti ----- x 100% Populasi Penyandang Disabilitas	100	100	100	100	100



3	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Anak Terlantar	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Jumlah Gelandangan / Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Gelandangan / Pengemis	100	100	100	100	100
6	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Jumlah Keluarga yang Seharusnya Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat ----- x 100% Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Bantuan Sosial yang Ada	90	94	96	98	98
7	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial ----- x 100% Total Warga Negara Korban Bencana	100	100	100	100	100
8	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Jumlah Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani ----- x100% Total Tempat Rintisan Kemerdekaan	100	100	100	100	100

### 7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah pengampu SPM sebagai berikut:

**Tabel 7.4**  
**Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja		Target Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	87%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### **7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.5**  
**Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022-2026**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026	
<b>TUJUAN 01 Tanpa Kemiskinan</b>								
<b>Tujuan SDGs 01 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>								
<b>Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	320	330	310	320	330	
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	7,440	7450	7430	7440	7450	
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	100	100	100	100	100	





**RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Sidenreng Rappang

1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-				
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-				
1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	22,000	25,000	20,000	22,000	25,000

**TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan**

**Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara**

**10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional**

10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.15	0.1			
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	0.01	0.009	5.04	5.04	5.04
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	0.21	0.18			
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2024-2026 bergantung pada kerjasama antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder sosial.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas di bidang sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang di masa akan datang.

Pangkajene Sidenreng,      Maret 2023  
**Kepala Dinas,**

**SOALIHIN, S, Pd, M, Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660717 199103 1 018